



Manajemen Pembiayaan dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri 1 Moga Kabupaten Pemalang

Sri Rustantinah¹, Ghufron Abdullah², Ngurah Ayu Nyoman.M³

^{1,2,3} Universitas PGRI Semarang, Central Java, Indonesia

Email: srirustantinah123@gmail.com¹, ghufronazzuhri@gmail.com²,
ngurahayunyoman@upgris.ac.id³

Abstrak

Manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Kepala Sekolah bersama guru dan Komite Sekolah dalam menentukan anggaran pembelajaran harus berdasarkan kebutuhan yang riil dan benar-benar sangat dibutuhkan untuk keperluan dalam rangka menunjang penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen pembiayaan di SMP Negeri 1 Moga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan di SMP Negeri 1 Moga sudah sesuai dengan ruang lingkup manajemen pembiayaan yaitu budgeting (penyusunan anggaran), Accounting (Pembukuan) dan Auditing (Pemeriksaan). Manajemen pembiayaan yang dilaksanakan dengan baik di SMP Negeri 1 Moga berdampak pada peningkatan mutu Pendidikan di SMP Negeri 1 Moga.

Kata Kunci: *Manajemen, Pembiayaan, Peningkatan mutu Pendidikan*

Abstract

School financial management is one of the factors that can determine the success of schools in an effort to improve the quality of education of the Principal together with teachers and the School Committee in determining the learning budget, which must be based on real needs and is really needed for the purpose of supporting the implementation of a good learning process. Quality. The purpose of this study was to analyze financing management in SMP Negeri 1 Moga. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observation, documentation. The results of this study indicate that the financing management at SMP Negeri 1 Moga is in accordance with the scope of financing management, namely budgeting (budget preparation), Accounting (bookkeeping) and Auditing (Examination). Well-implemented financing management at SMP Negeri 1 Moga has an impact on improving the quality of education at SMP Negeri 1 Moga.

Keywords: *Management, Financing, Improving the quality of education*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi setiap negara, maju tidaknya sebuah negara di masa yang akan datang dapat diukur dari seberapa baiknya pendidikan yang sedang berlangsung di negara tersebut, pendidikan juga merupakan salah satu alat untuk mencapai cita-cita bagi sebuah negara, misalnya Indonesia yang cita-citanya telah terpampang jelas pada dasar negaranya yaitu menjadi negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berdemokrasi dan berkeadilan sosial. Dalam memperjuangkan cita-cita negara Indonesia tersebut jelas membutuhkan segenap komponen bangsa yang mampu mengemban amanat kelima dasar negara tersebut dan salah satu jalan yang dapat di tempuh negara untuk melahirkan generasi yang dapat diandalkan adalah dengan cara memberikan mereka semua pendidikan yang terbaik dan terjangkau bagi seluruh elemen masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari berbagai komponen yang berpengaruh untuk menunjang berbagai proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai Pendidikan yang berkualitas, Pendidikan mempunyai standar acuan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan adalah salah satu indikator lembaga pendidikan mencapai tujuan pendidikan yang termasuk dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan terlaksana dengan baik. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan lembaga pendidikan memerlukan pembiayaan. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar pada sebuah lembaga pendidikan. Hal ini terlihat dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran atau pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota). Hal tersebut sebagaimana diatur pada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 11 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Pasal 49 Ayat 1 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya anggaran pendidikan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kegiatan mengalokasikan dana pada pelaksanaan operasional pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks sehingga dibutuhkan kejelasan pemberian pedoman penyusunan APBS oleh Depdiknas, pengawasan terhadap pembiayaan sekolah yang optimal, dan tenaga yang kompeten dalam mengelola manajemen pembiayaan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pendidikan.

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tatanan, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan

pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini. Dalam penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga), manajemen pembiayaan merupakan unsur yang mutlak harus terus ditingkatkan kualitasnya. Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah. Perencanaan dan penggunaan biaya tersebut menggambarkan aktivitas manajemen pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan (Sukardi, 2019).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat kita ketahui pentingnya biaya pendidikan, untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu namun harus pula ditunjang dengan suatu manajemen yang layak, dengan memberdayakan fungsi-fungsinya yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada penjelasan pasal 3 yang disebutkan bahwa ayat 1: Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

Dalam melancarkan kebijakan atau program pendidikan yang lebih bermutu, lebih produktif dan lebih profesional, maka pengelolaan pendidikan yang dimaksudkan adalah keseluruhan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian dalam rangka mengatur penerimaan, penggunaan (alokasi) dan pertanggung jawaban keuangan/dana untuk menunjang pelaksanaan program penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.

Manajemen pembiayaan meliputi perencanaan pembiayaan, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan finansial merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran, yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi efek samping yang merugikan. Sementara pelaksanaan keuangan atau anggaran ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan, sedangkan pengendalian merupakan proses evaluasi kinerja penggunaan anggaran terhadap pencapaian tujuan.

Beberapa persoalan yang sering terjadi dalam lembaga pendidikan salah satunya yaitu terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya yaitu sumber dana yang terbatas, pencairan dana yang berasal dari pemerintah yaitu dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang mengalami keterlambatan atau bahkan dana yang bisa dicairkan tidak sepenuhnya. Sedangkan pembiayaan di sekolah membutuhkan pemenuhan kebutuhan yang harus segera terpenuhi (Abdul Rokhim, Adi Aliyan, Ara Hidayat, 2019) Dari aspek manajerial, kepala sekolah harus mampu memahami tugas dan proses manajemen pembiayaan pendidikan, mulai dari penyusunan RKAS bagi sekolah, misalnya dengan sumber pendanaan dari BOS.

Pemahaman yang baik terhadap penyusunan RKAS akan memiliki dampak yang baik pula secara tidak langsung terhadap optimalisasi pengalokasian dana yang diberikan pemerintah berupa dana BOS. Selain itu, perencanaan dan pengawasan penggunaan pembiayaan tersebut perlu ditingkatkan agar mampu mencapai mutu pendidikan yang baik. Tugas setiap proses manajemen pembiayaan hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan tenaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pada akhirnya hal itu semua diharapkan mampu memenuhi standar nasional pendidikan sehingga mampu mencapai peningkatan mutu pendidikan.

Dalam merancang dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah ada beberapa hal

yang harus diperhatikan, diantaranya masalah efektivitas pembiayaan sebagai salah satu alat ukur efisiensi. Efektivitas pembiayaan merupakan faktor penting yang senantiasa diperhitungkan bersamaan dengan efisiensi, artinya suatu program kegiatan tidak hanya menghitung waktu yang singkat tetapi tidak memperhatikan anggaran yang harus dikeluarkan seperti biaya operasional dan dana pemeliharaan sarana yang mengarah pada pemborosan. Jadi dalam hal ini Kepala Sekolah bersama-sama guru dan Komite Sekolah dalam menentukan anggaran pembelajaran harus berdasarkan kebutuhan yang riil dan benar-benar sangat dibutuhkan untuk keperluan dalam rangka menunjang penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka Peneliti mengadakan penelitian di SMP Negeri 1 Moga Kabupaten Pemalang. Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah negeri favorit yang berada di kecamatan Moga Kabupaten Pemalang. Dari segi input, SMP Negeri 1 Moga setiap awal tahun pelajaran selalu menerima siswa sesuai dengan daya tampung yang dibutuhkan. Jumlah pendaftar selalu melebihi daya tampung yang dibutuhkan, hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan putra atau putrinya di SMP Negeri 1 Moga. Dalam hal proses SMP Negeri 1 Moga melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan mengedepankan peningkatan mutu, baik pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, para pendidik mempunyai etos kerja yang tinggi, Output yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat dilihat dari banyaknya prestasi yang diraih. Selama kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2022 ini, ada sejumlah 24 prestasi siswa yang diraih oleh SMP Negeri 1 Moga, baik akademik maupun non akademik, tingkat kecamatan, kabupaten maupun tingkat provinsi. Pada Tahun 2020 SMP Negeri 1 Moga memperoleh rata-rata capaian raport mutu diatas rata-rata kabupaten, provinsi dan nasional, artinya bahwa mutu sekolah di SMP Negeri 1 Moga berdasar raport mutu menunjukkan sekolah yang bermutu meskipun belum mencapai SNP.

Pencapaian mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Moga tentunya tidak terlepas dari dukungan manajemen pembiayaan yang dilakukan. Perencanaan pembiayaan merupakan keharusan bagi SMP Negeri 1 Moga yang memiliki status akreditasi A yang selalu menginginkan kemajuan dalam lembaga pendidikan mengingat bahwa pembiayaan merupakan komponen yang paling menentukan keberhasilan pendidikan sehingga sekolah ini selalu melakukan perencanaan pembiayaan setiap tahunnya. Atas dasar realitas tersebut Peneliti tertarik untuk meneliti Bagaimana manajemen pembiayaan yang diterapkan di sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan SMP Negeri 1 Moga. Penelitian manajemen Pendidikan ini menekankan pada 3 ruang lingkup manajemen pembiayaan, yaitu: (1) Penyusunan anggaran (*budgeting*) Dalam Perencanaan RKAS, SMP Negeri I Moga berpedoman pada Rencana Kegiatan Sekolah yang sudah disusun oleh sekolah serta mengacu pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Perencanaan pembiayaan dan penyusunan anggaran dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Moga dialokasikan pada pemenuhan kebutuhan pada 8 Komponen Standar Nasional Pendidikan. (2) kegiatan pembukuan (*accounting*) SMP Negeri 1 Moga melalui Bendahara yang ditunjuk mengelola atau menggunakan keuangan sekolah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RKAS. Penerimaan maupun pengeluaran dicatat dan dibukukan dengan baik, yang selanjutnya diinput melalui aplikasi sibpos dan Arkas, pembukuan tersebut meliputi BKU, Buku Bank, Buku pembantu pajak dan Buku laporan lainnya, dan (3) kegiatan pemeriksaan (*controlling*) yaitu Kepala sekolah melakukan pemeriksaan secara rutin tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara guna mengevaluasi jalanya kegiatan pengelolaan pembiayaan apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Peneliti termotivasi ingin mengangkat manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu Pendidikan dalam sebuah penelitian yang berjudul "Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Di SMP Negeri 1 Moga Kabupaten Pemalang".

Pengertian Mutu Pendidikan

Suryadi dan Tilaar (1985, dalam Krisbiyanto 2019) mengemukakan bahwa mutu pendidikan adalah merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

Menurut Mujamil (2007, dalam Wiyono 2021) mutu Pendidikan adalah kemampuan Lembaga Pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.

Mutu pendidikan pada dasarnya mencakup keseluruhan proses pendidikan, yaitu input, proses dan output pendidikan. Untuk menghasilkan input, proses dan output pendidikan yang bermutu harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan benar sehingga berdampak kepada efisiensi pelaksanaan program, dan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan.

Jadi peningkatan mutu pendidikan adalah kemajuan yang dihasilkan dalam proses pendidikan sehingga menghasilkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat pendidikan sebagaimana yang telah ditargetkan. Layaknya sebagai organisasi, maka pendidikan memerlukan adanya sebuah manajemen agar bisa mencapai tujuannya serta meningkatkan pendidikan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan yang harmonis dan terarah.

Standar Mutu Pendidikan

Yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diantaranya bisa dijabarkan sebagaimana berikut:

- a. Standar Kompetensi Lulusan, merupakan standart kemampuan lulusan yang meliputi psikomotorik, kognitif dan afektif.
- b. Standar Isi, merupakan standar yang berisi kawasan bahan ajar serta tingkat kompetensi yang tercurahkan dalam klasifikasi mengenai kompetensi lulusan, kompetensi bahan ajar, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tingkatan dan jenis pendidikan tertentu;
- c. Standar Proses, merupakan Standar yang berhubungan dengan pengoperasian pembelajaran pada suatu satuan pendidikan dalam rangka menggapai standar kompetensi lulusan;
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, merupakan klasifikasi pendidikan pra-jabatan, kepantasan fisik ataupun mental dan pendidikan dalam jabatan;
- e. Standar Sarana dan Prasarana, merupakan Standar yang berhubungan dengan standar minimal mengenai ruang pembelajaran, lapangan olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja tempat bersantai, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang dibutuhkan untuk menyokong kegiatan belajar mengajar, termasuk penerapan teknologi informasi serta komunikasi;
- f. Standar Pengelolaan, merupakan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proses pendidikan pada jenjang satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi ataupun nasional supaya dapat terlaksana efisiensi serta efektivitas pengelolaan pendidikan;
- g. Standar Pembiayaan, merupakan standart yang mengendalikan elemen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang aktif berjalan selama satu tahun;
- h. Standar Penilaian, merupakan standar nasional pendidikan terakhir dan tentunya berhubungan dengan tata cara, prosedur, serta instrumen penilaian hasil belajar pada peserta didik.

Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Pendidikan yang bermutu adalah cita-cita juga kewajiban segenap pemegang kendali (stakeholder) pendidikan. Pada umumnya setiap orang pastinya akan memilih untuk menuntut ilmu di

lembaga pendidikan yang berkualitas baik. Dengan berpedoman pada hal ini, maka sekolah/ lembaga pendidikan wajib mampu memberikan layanan serta kualitas yang tinggi sehingga tidak dicampakkan dan sanggup untuk berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain nya.

Kualitas pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif. Menurut Zamroni, peningkatan mutu pendidikan adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan belajar dengan tujuan agar target pendidikan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.

Pengertian Manajemen Pembiayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan sebagai suatu lembaga pendidikan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan di segala bidang baik segi sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas kerja maupun kesejahteraan yang layak bagi seluruh tenaga pendidik (Undang R.W, 2021).

Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Lembaga Pendidikan

Melalui kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan, kebutuhan pendanaan, pembiayaan kegiatan dan anggaran lembaga pendidikan dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, digunakan untuk membiayai pelaksanaan program lembaga pendidikan secara efektif dan efisien, sekaligus dipertanggungjawabkan untuk memberikan rasa puas pada pihak-pihak yang mendonasikan uang untuk kegiatan lembaga pendidikan. Uraian ini sekaligus memperkuat Untuk itu tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan adalah:

- a. Meningkatkan penggalan sumber biaya lembaga pendidikan
- b. Menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan
- e. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan
- f. Mengatur dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran.
- g. Membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji.
- h. Meningkatkan partisipasi stakeholders pendidikan dalam pembiayaan pendidikan (Tjandra, W.R., 2006).

Prinsip Pembiayaan Pendidikan

Dalam sistem manajemen keuangan pendidikan terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Berikut ini adalah penjabarannya:

- a. Transparan

Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga

bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah samping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbre balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan wang sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudaha di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaa uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan meng. ikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

c. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu: a) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya, Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. b) Dilihat dari segi hasil, Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Ruang Lingkup dalam manajemen keuangan Pendidikan

Di dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu: *budgeting* (penyusunan anggaran), *accounting* (pembukuan), dan *auditing* (pemeriksaan).

a. *Budgeting* (Penyusunan Anggaran)

Menurut Wahyudin U.R, 2021 Istilah anggaran sering kali ditangkap sebagai pengertian suatu rencana. Namun dalam bidang pendidikan sering dijumpai dua istilah yakni RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Dalam dua istilah tersebut “anggaran bukanlah sebuah rencana”. Istilah rencana” telah memberikan penekanan atas pemakaian istilah “anggaran ” sebagai suatu rencana. Kegiatan identifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan, menganalisis alternatif, serta

membuat rekomendasi alternatif untuk mencapai sasaran tujuan pendidikan.

Nanang Fattah (2002, dalam Arwildayanto 2017) Penyusunan anggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan mengidentifikasi Tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan Tujuan menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis *cost effectiveness*, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Kegiatan penyusunan anggaran (*budget*) pendidikan merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam lembaga kurun waktu tertentu.

Jaja dan Jahari (2013 dalam Djuwairiyah 2021) Perencanaan keuangan (*budgeting*) merupakan kegiatan penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam waktu tertentu.

Dari beberapa Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran (*budgeting*) adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan, menganalisis alternatif, serta membuat rekomendasi alternatif yang diwujudkan dalam rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam waktu-waktu tertentu untuk mencapai sasaran pendidikan.

Dalam menentukan biaya satuan pendidikan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran perkomponen pendidikan yang digunakan oleh murid.

Menurut Mulyana dengan mengutip pendapat Morphet dalam Jaja Jahari dan Amirulloh Syarbini ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam penganggaran biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran belanja harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
- 2) Mengembangkan sistem perencanaan yang efektif.
- 3) Memonitor dan menilai lulusan pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan berikutnya.

Adapun dalam penyusunan anggaran pendidikan tentu memerhatikan sumber keuangan pendidikan pada lembaga pendidikan itu sendiri, misalnya di sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren dan lainnya, yang secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:

- 1) Pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan;
- 2) Orang tua atau peserta didik;
- 3) Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat (Depdiknas,2000).

b. Accounting (Pembukuan)

Menurut Wahyudin, U.R, 2021 Kegiatan kedua dari administrasi pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan meliputi dua hal, yaitu yang pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan

dikenal dengan pengurusan bendahara.

Jaja dan Jahari (2013 dalam Djuwairiyah 2021) Pelaksanaan (akunting) digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Pelaksanaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Keduanya ini harus dibukukan sesuai prosedur pengelolaan selaras dengan dengan ketentuan atau kesepakatan bersama.

Menurut Arwildayanto dkk (2017 Pembukuan (accounting) dalam kegiatan pengurusan keuangan pendidikan meliputi dua hal, yaitu pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama yakni, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembukuan (accounting) adalah Kegiatan pengurusan keuangan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang dan kegiatan menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang. Keduanya ini harus dibukukan sesuai prosedur pengelolaan selaras dengan ketentuan atau kesepakatan bersama

c. *Auditing (Pemeriksaan)*

Wahyudin, UR 2021, Auditing (Pemeriksaan) adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban Penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada di dalam Departemen mempertanggungjawabkan pengurusan keuangan ini kerana BPK melalui departemen masing-masing. pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang Ada beberapa jenis pemeriksaan (audit) keuangan yaitu pemeriksaan (audit) laporan keuangan, bertujuan menentukan laporan keuangan secara keseluruhan informasi yang terukur dan sudah diverifikasi, disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu; dan pemeriksaan (audit) operasional, merupakan penelaahan atas bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya.

Jaja dan Jahari (2013 dalam Djuwairiyah 2021) Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian barang bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Secara sederhana pengawasan terdiri dari memantau (monitoring), menilai dan melaporkan. Proses evaluasi ini harus dilakukan agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan manajemen keuangan berjalan efektif dan efisien serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya.

Arwildayanto (2017) Pemeriksaan (auditing) adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus dapat diukur. Ada beberapa jenis pemeriksaan (audit) keuangan, pertama, pemeriksaan (audit) laporan keuangan, bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan merupakan informasi yang terukur dan sudah diverifikasi, disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.

Dari beberapa Pengertian di atas dapat disimpulkan Pemeriksaan (Auditing) adalah semua

kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban Penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang, yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis informasi mendalam tentang manajemen pembiayaan pada kegiatan budgeting (penyusunan anggaran) dalam peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Moga Kabupaten Pemalang. Manajemen pembiayaan pada kegiatan accounting (pembukuan) dalam peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Moga Kabupaten Pemalang. Serta manajemen pembiayaan pada kegiatan auditing (pemeriksaan) dalam peningkatan mutu di SMP Negeri 1 Moga Kabupaten Pemalang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif penelitian kualitatif yakni penelitian dengan pendekatan kualitatif yang umumnya menekankan analisis proses berpikir secara deduktif dan induktif berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah (Arifah, 2018: 25).

Jenis penelitian yang dipakai adalah fenomenologis yakni sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti untuk menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subyektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratori (Alase, 2017). Fenomenologi pada penelitian ini yakni menemukan informasi tentang implementasi SPMI pada Standar Proses di SMP Negeri 1 Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Sumber data sangat penting guna menentukan teknik pengumpulan data. Sumber data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder (Purhantara, 2010). Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian melalui hasil observasi langsung peneliti sebagai *participant observation*, wawancara mendalam (*indept interview*) dengan informan kunci (*key informant*) yang sudah dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Informan kunci (*key informant*) yang dipilih diantaranya kepala sekolah, Bendahara, Guru dan Komite. Data sekunder yaitu data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, umumnya berbentuk bukti, catatan, laporan, dokumen, yang tersusun dan diarsipkan. Dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen EDS/ raport mutu, dokumen RKAS, dokumen pembukuan dan dokumen hasil pemeriksaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sebagainya sehingga dapat mudah dipahami. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisa data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data, kesimpulan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang melakukan kajian terhadap pola perilaku masyarakat di lingkungan dengan mengambil data wawancara sebagai sumber data utama.

Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi deskriptif. Deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang kemudian dianalisis untuk memaparkan permasalahan dengan judul Analisis Ketidaksetaraan Gender yang terjadi.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder adalah data yang berasal dari buku-buku, pendapat para ahli

hukum, dan sumber lain yang berasal dari lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui hasil wawancara dan survey.

HASIL

Berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi, peneliti mendapatkan data bahwa SMP Negeri 1 Moga telah Melaksanakan manajemen pembiayaan dengan baik, meliputi *Budgeting* (Penyusunan anggaran), *Accounting* (Pembukuan) dan *Auditing* (Pemeriksaan), Sehingga SMP Negeri 1 Moga mengalami peningkatan mutu pendidikan, hal ini dapat dilihat pada pencapaian raport mutu pendidikan.

PEMBAHASAN

Manajemen pembiayaan di SMP Negeri 1 Moga dalam peningkatan mutu telah berjalan dengan baik, yang mencakup tiga fungsi manajemen sesuai fokus penelitian yaitu Budgeting (Penyusunan anggaran), Accounting (pembukuan) dan Auditing (Pemeriksaan).

***Budgeting* (Penyusunan Anggaran)**

Budgeting (Penyusunan anggaran) adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan, menganalisis alternatif, serta membuat rekomendasi alternatif yang diwujudkan dalam rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam waktu-waktu tertentu untuk mencapai sasaran pendidikan.

Perencanaan adalah keseluruhan proses berfikir dan menyusun rencana-rencana tentang tindakan yang akan di lakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tanpa adanya perencanaan maka proses pengorganisasian, penggerakkan, pengarahan, dan pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik. Perencanaan mencakup penetapan tujuan, sasaran kegiatan, pemilihan strategi kegiatan, menetapkan indikator keberhasilan organisasi, dan perencanaan penilaian dan evaluasi.

Secara umum pelaksanaan *budgeting* (penyusunan anggaran) Negeri dalam peningkatan mutu di SMP N 1 Moga telah berjalan baik yaitu telah dilaksanakannya : a). mengidentifikasi tujuan, b) menentukan prioritas, c) menjabarkan tujuan, d) menganalisis alternatif, e. membuat rekomendasi alternatif yang diwujudkan dalam rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang, dan f) menjadikan rencana operasional yang telah disusun dan disahkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam waktu-waktu tertentu untuk mencapai sasaran pendidikan.

Hal ini telah sesuai dengan pendapat Nanang Fattah (2002, dalam Arwildayanto 2017) bahwa Penyusunan anggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan mengidentifikasi Tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan Tujuan menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost eff ectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Kegiatan penyusunan anggaran (budget) pendidikan merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam lembaga kurun waktu tertentu. Bersesuaian juga dengan pendapat Jaja dan Jahari (2013 dalam Djuwairiyah 2021) Perencanaan keuangan (*budgeting*) merupakan kegiatan penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam waktu tertentu.

Berkaitan dengan *budgeting* (penyusunan anggaran) maka penyusunan anggaran yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Moga dalam peningkatan mutu sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Abdul Rokhim dkk (2019) perencanaan pembiayaan dibuat pada saat penyusunan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) dengan proses penyusunan yang dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk diawali dengan EDS, dengan melibatkan seluruh komponen sekolah sesuai dengan petunjuk.

Accounting (Pembukuan)

Accounting (Pembukuan) adalah Kegiatan pengurusan keuangan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang dan kegiatan menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang. Keduanya ini harus dibukukan sesuai prosedur pengelolaan selaras dengan ketentuan atau kesepakatan bersama.

Accounting (Pembukuan) di SMP Negeri 1 Moga dalam peningkatan mutu pendidikan meliputi: a) Adanya penanggung jawab kegiatan, b) Adanya pelaksana penatausahaan, c) Adanya pencatatan kegiatan Penerimaan, d) Adanya pencatatan kegiatan penyimpanan, d) Adanya pencatatan kegiatan pengeluaran dan f) Adanya pembukuan yang dikerjakan.

Dari temuan tersebut maka fungsi Accounting (pembukuan) di SMP Negeri 1 Moga dalam peningkatan mutu telah berjalan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyudin UR (2021) Kegiatan kedua dari administrasi pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan meliputi dua hal, yaitu yang pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan pengurusan bendahara. Bersesuaian juga dengan pendapat Arwildayanto dkk (2017) Pembukuan (accounting) dalam kegiatan pengurusan keuangan pendidikan meliputi dua hal, yaitu pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama yakni, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan.

Berkaitan dengan accounting (Pembukuan) dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan accounting (pembukuan) juga berjalan dengan baik, sesuai dengan pendapat Penelitian Azhariadi dkk (2020) menajerial pelaksanaan anggaran dana BOS dari mulai penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dilaporkan sesuai juknis BOS, dan mengikuti rambu-rambu yang termaktub di dalam juknis BOS yang alokasinya sudah tersusun dalam RKAS.

Auditing (Pemeriksaan)

Pemeriksaan (Auditing) adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban Penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang, yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Auditing (pemeriksaan) di SMP Negeri 1 Moga dalam peningkatan mutu pendidikan meliputi: a) Adanya pertanggungjawaban kegiatan Penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran oleh bendahara Kepada pihak yang berwenang, b) Adanya pemeriksaan dari pihak yang berwenang c) Adanya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi dan d) Tidak Adanya penyimpangan dana oleh pihak

sekolah.

Berdasarkan temuan tersebut maka kegiatan auditing (pemeriksaan) dapat dikatakan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyudin UR (2021) Auditing (Pemeriksaan) adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban Penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada di dalam Departemen mempertanggungjawabkan pengurusan keuangan ini kerana BPK melalui departemen masing-masing. pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang Ada beberapa jenis pemeriksaan (audit) keuangan yaitu pemeriksaan (audit) laporan keuangan, bertujuan menentukan laporan keuangan secara keseluruhan informasi yang terukur dan sudah diverifikasi, disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu; dan pemeriksaan (audit) operasional, merupakan penelaahan atas bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Bersesuaian juga dengan pendapat Arwildayanto (2017) Pemeriksaan (auditing) adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus dapat diukur. Ada beberapa jenis pemeriksaan (audit) keuangan, pertama, pemeriksaan (audit) laporan keuangan, bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan merupakan informasi yang terukur dan sudah diverifikasi, disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.

Berkaitan dengan pengawasan auditing (pemeriksaan) juga telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Azhariadi dkk (2020) Evaluasi, pertanggung jawaban dan pengawasan anggaran dana BOS mengacu dengan standar pembiayaan dana BOS, secara internal oleh Pengelola dana BOS Sekolah dan secara eksternal oleh Tim Manajemen BOS kabupaten, inspektorat setiap akhir triwulan.

SIMPULAN

Budgeting (Penyusunan anggaran) di SMP Negeri 1 Moga sudah berjalan dengan baik hal ini sesuai ditunjukkan bahwa dalam penyusunan anggaran meliputi: a) mengidentifikasi tujuan b) menentukan prioritas, c) menjabarkan tujuan, d) menganalisis alternatif, e. membuat rekomendasi alternatif yang diwujudkan dalam rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang, dan f) menjadikan rencana operasional yang telah disusun dan disahkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam waktu-waktu tertentu untuk mencapai sasaran pendidikan

Accounting (Pembukuan) di SMP Negeri 1 Moga sudah berjalan baik. Hal ini sesuai dengan ditunjukkan dalam kegiatan accounting (Pembukuan) bahwa dalam pembukuan meliputi: a) Adanya penanggung jawab kegiatan, b) Adanya pelaksana kegiatan penatausahaan, c) Pencatatan kegiatan Penerimaan dan pengambilan, d) Pencatatan kegiatan penyimpanan, e) pencatatan kegiatan pengeluaran dan f) Adanya pembukuan lain yang dikerjakan oleh bendahara.

Auditing (Pemeriksaan) di SMP Negeri 1 Moga juga sudah berjalan dengan baik, Hal ini sesuai dengan ditunjukkan dalam kegiatan auditing (pemeriksaan) meliputi: a) Pertanggungjawaban kegiatan Penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran oleh bendahara, b). Adanya pemeriksaan dari pihak yang berwenang, c) Kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran dan d) Tidak ada penyimpangan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. 2016. *Strategic Management For Educational Management: Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Anam Khaerul.2021. Manajemen Pembiayaan dalam meningkatkan mutu Pendidikan di MTs Negeri 5 Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah *Jurnal Balai Diklat Keagamaan Denpasar Volume 3*
- Arifah, Nur. 2018. *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis,dan Disertasi*. Yogyakarta: Araska Publisier
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arwildayanto dkk .2017. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Widya Padjajaran
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Dedi. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustari Mohamad .2014. *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2001), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung, Alfabeta, Cet. XXVI, 2017.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- . 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Sukardi (2019) Penerapan Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Kota Bima, *Kajian Pendidikan dan Ekonomi Vol 2 NO 2*
- Tuala Riyuzen Praja (2018). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah*, Bandar Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara* Jakarta : Dokumen negara
- Wahyudin U.R. 2021 *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektifitas, Transparansi dan Akuntabilitas)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.